

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR M.HH-12.PR.01.03

TARGET KINERJA UNIT PUSAT
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	Integrasi Kinerja Individu (Sasaran Kinerja Pegawai) Di Aplikasi SIMPEG Dengan Sasaran Kinerja Organisasi Pada Aplikasi E-PERFORMANCE Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Terintegrasinya Aplikasi E-Performance dengan SIMPEG	Integrasi antara Sasaran Kerja Pegawai pada Aplikasi SIMPEG dengan Indikator Kinerja Organisasi pada Aplikasi E-Performance	B03: Melakukan integrasi Simpeg dengan e-performance B06: <i>Pilot Project</i> Setjen B09: Sosialisasi pengoperasian aplikasi di lingkungan Unit Sekretariat Jenderal B12: Integrasi dengan Unit Eselon I lainnya Sosialisasi pengoperasian aplikasi di lingkungan	B03: <i>Capture</i> aplikasi yang sudah terintegrasi B06: <i>Capture</i> hasil uji coba aplikasi yang sudah terintegrasi B09: Laporan sosialisasi B12: <i>Capture</i> aplikasi yang sudah terintegrasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Unit Sekretariat Jenderal		
2	Pembangunan aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara <i>Online</i>	Pelaporan SPIP dapat dilakukan secara <i>Online</i>	Tersedianya aplikasi SPIP secara <i>Online</i>	B03: Pemetaan proses bisnis pelaporan SPIP B06: Pembangunan aplikasi pelaporan SPIP B12: <i>Pilot Project</i> menggunakan aplikasi Pelaporan SPIP <i>Online</i> Unit Setjen	B03: Peta proses bisnis pelaporan SPIP B06: Dokumentasi rapat dan <i>Capture</i> perkembangan pembangunan aplikasi B12: <i>Capture</i> hasil ujicoba aplikasi SPIP <i>Online</i> Unit Setjen	
3	Pemetaan kebutuhan SOP berdasarkan proses bisnis level 2 Unit Eselon I	SOP pada Unit eselon I yang telah disusun mendapatkan penetapan melalui Keputusan Menteri dan diunggah pada e-SOP	10 Unit eselon I telah menyusun SOP dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri serta diunggah pada e-SOP	B03 : SOP yang telah disusun oleh 3 unit eselon I dan mendapatkan penetapan B06 : SOP yang telah disusun oleh 6 (enam) unit eselon I dan mendapatkan penetapan	B03 : 1. Dokumen rapat 2. Dokumen SOP pada 3 unit eselon I 3. <i>Screenshot</i> pada e-SOP B06 : 1. Dokumen rapat 2. Dokumen SOP pada 6 (enam) unit eselon I	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					3. <i>Screenshot</i> pada e-SOP	
				B09 : SOP yang telah disusun oleh 10 unit eselon I dan mendapatkan penetapan	B09 : 1. Dokumen rapat pada 10 unit eselon I 3. <i>Screenshot</i> pada e-SOP	
				B12 : Evaluasi dan pemantauan e-SOP	B12: <i>Screenshot</i> e-SOP	
4	Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Menurunnya nilai temuan BPK di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Menurunnya nilai temuan pengadaan barang/jasa yang menjadi objek pemeriksaan BPK	B06: Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	B06: Laporan Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	
				B12: Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	B12: Laporan Pelaksanaan pembinaan melalui pendampingan dan monev	
		2. Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui SIPaSTIKU	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	B06: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B06: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B12: <i>Screenshot</i> laporan Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	
5	Meningkatnya Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tercapainya Nilai indeks pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tercapainya penilaian indeks Pengelolaan kearsipan Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari 60 sampai dengan 80	B03: 1. Menerbitkan Surat Edaran Sekjen kepada Kantor Wilayah terkait Pengawasan Arsip Inaktif 2. Melakukan Webinar Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Terkait	B03: 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal 2. Laporan pelaksanaan Webinar Sosialisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Terkait Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif)	
				B06: Pelaksanaan pengawasan lapangan Pengelolaan kearsipan Dinamis	B06: Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan kearsipan Dinamis (arsip aktif dan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				(arsip aktif dan inaktif) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	inaktif) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
				B09: Pelaksanaan pengawasan lapangan Pengelolaan kearsipan Dinamis (arsip aktif dan inaktif) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan kearsipan Dinamis (arsip aktif dan inaktif) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
				B12: Tercapainya hasil laporan pengawasan penilaian indeks Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif)	B12: Laporan Indeks Penilaian Pengelolaan Arsip Dinamis (arsip aktif dan inaktif) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
6	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid 19	Tetap sehat dimasa New Normal	B03: Inventarisasi jumlah pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 dan	B03: 1. Data pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Sosialisasi protokol kesehatan	2. Laporan pelaksanaan Sosialisasi	
				B06: Monitoring penerapan protokol kesehatan di Unit Utama Kemenkumham	B06: Laporan monitoring	
				B09: Monitoring penerapan protokol kesehatan di Kantor Wilayah	B09: Laporan monitoring	
				B12: Evaluasi dan Laporan	B12: Laporan	
7	Pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya indeks sistem merit Pegawai memiliki dokumen pengembangan Kompetensi Pegawai memiliki dokumen pengembangan karir pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai indeks sistem merit dari nilai 324 kategori III (baik) menjadi 350 kategori IV (sangat baik) Tersusunnya dokumen pengembangan kompetensi pegawai Tersusunnya dokumen 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dan inventarisasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Persiapan pelaksanaan verifikasi data kebutuhan dan rencana 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi dengan data dari: <ol style="list-style-type: none"> unit kerja hasil penilaian kompetensi tahun 2020 gap kebutuhan dalam standar kompetensi jabatan 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			pengembangan karir pegawai	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan kompetensi 3. Persiapan dan Sosialisasi Penyusunan dokumen pengembangan karir 4. Penyiapan/ pengumpulan bahan dokumen pengembangan karir 	<ul style="list-style-type: none"> 2. SK Tim Penyusunan Verifikasi Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 3. SK Tim dan SK Narasumber sosialisasi penyusunan dokumen pengembangan karir 4. Bahan dokumen pengembangan karir 	
				B06: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 2. Pelaksanaan dan Penetapan Dokumen pengembangan karir 	B06: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (3000 pegawai) 2. Dokumen pengembangan karir unit utama 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					dan kanwil (500 pegawai)	
				B09: 1. Validasi Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 2. Pelaksanaan dan Penetapan Dokumen pengembangan karir	B09: 1. Dokumen pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (3000 pegawai) 2. Dokumen pengembangan karir unit utama dan kanwil (500 pegawai)	
				B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi penyusunan dokumen pengembangan kompetensi 2. Evaluasi Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Pemantauan dan evaluasi	B12: 1. Laporan Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi 2. Hasil Evaluasi Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Laporan penyusunan dokumen	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				penyusunan dokumen pengembangan karir	pengembangan karir	
8	Sistem Informasi Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terciptanya Aplikasi E-TP/TGR di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Tersedianya Laporan TP/TGR yang <i>update</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya SOP E-TP/TGR 2. Menyusun rancang bangun aplikasi E-TP/TGR <p>B06 :</p> <p>Terbangunnya sistem Aplikasi E-TP/TGR</p> <p>B09 :</p> <p>Uji coba Aplikasi E-TP/TGR pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Eselon I (Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi) 2. Kantor Wilayah (Jawa Barat (Banten), Jawa Tengah (Jogyakarta), Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Ambon) 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Rancangan Bagan Aplikasi E-TP/GR <p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Screen Shoot Aplikasi E-TP/TGR; 2. Terciptanya sistem Aplikasi E-TP/TGR 60% <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshoot</i> Aplikasi E-TP/TGR 2. Data Kerugian Negara Satuan Kerja Yang sdh mengisi Aplikasi E-TP/TGR 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12 : Evaluasi dan Efektivitas Aplikasi E-TP/TGR pada : 1. Unit Eselon I (Ditjen PAS dan Ditjen Imigrasi) 2. Kantor Wilayah (Jawa Barat (Banten), Jawa Tengah (Jogyakarta), Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Ambon)	B12 : Laporan Evaluasi Aplikasi E-TP/TGR	
9	Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	B03 : 1. Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2020 2. Tersusunnya Laporan Keuangan TA. 2020 <i>Unaudited</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	B03 : Laporan Keuangan TA. 2020 <i>Unaudited</i>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06 : 1. Tersusunnya Laporan Keuangan TA. 2020 <i>Audited</i> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2021	B06 : 1. Laporan Keuangan TA. 2020 <i>Audited</i> 2. Notula Rapat penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2021	
				B09: Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I T.A. 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	B09: Laporan Keuangan Semester I TA. 2021	
10	Mendorong Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI	Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI dapat diselesaikan dengan cepat	Temuan Pemeriksaan BPK RI dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI	B03 : Evaluasi Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI TA 2019 dan tahun-tahun sebelumnya B06 : Terinventarisirnya Temuan	B03 : Rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI TA 2019 dan tahun-tahun sebelumnya beserta <i>progress</i> tindak lanjutnya B06 : Rekapitulasi temuan pemeriksaan BPK RI TA 2020 dan tahun-	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pemeriksaan BPK RI TA 2020	tahun sebelumnya beserta <i>progress</i> tindak lanjutnya	
				B12 : Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI tahun 2020	B12 : Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI tahun 2020	
11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 95 pada 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 95 pada 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di atas 96	B03 : 1. Melakukan Evaluasi terhadap Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA TA 2020 dibawah 95 2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 pada Tahun Anggaran 2020	B03: 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal 2. Laporan Evaluasi dan Kegiatan	
				B06 : 1. Melakukan Evaluasi terhadap Kantor Wilayah yang memiliki nilai	B06 : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal 2. Laporan Evaluasi dan Kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>IKPA Triwulan I TA 2021 dibawah 95</p> <p>2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 Triwulan I Tahun Anggaran 2021</p>		
				<p>B09 :</p> <p>1. Melakukan Evaluasi terhadap Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA Semester I TA 2021 dibawah 95</p> <p>2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan pada Kantor Wilayah yang memiliki nilai IKPA dibawah 95 Semester I Tahun Anggaran 2021</p>	<p>B09 :</p> <p>1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal</p> <p>2. Laporan Evaluasi dan Kegiatan</p>	
				<p>B12 :</p> <p>Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan</p>	<p>B12 :</p> <p>Laporan Nilai IKPA</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Anggaran 95 pada 33 Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
12	Tersedianya Pedoman pengelolaan Media Sosial	Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan media sosial kemenkumham	Tercapainya satu pengelolaan media sosial yang sama dalam menyebarkan informasi baik konten dan isi pada Unit Utama dan Kantor Wilayah	B03: Penyusunan Pedoman pengelolaan Media Sosial	B03: Pedoman pengelolaan Media Sosial	
				B06: Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial	B06: Keputusan Menteri Hukum dan HAM	
				B09: Sosialisasi Kepmenkumham Pedoman pengelolaan Media Sosial	B09: Laporan Sosialisasi	
13	Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham pada laman SIPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data informasi seluruh pelayanan publik kemenkumham di laman SIPP 2. Tersusunnya Pedoman Pengisian Sistem Informasi 	Terdapatnya Informasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim SIPP Kementerian 2. Penyusunan Pedoman Pengisian SIPP 	B03: <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim SIPP Kemenkumham 2. Pedoman Pengisian SIPP 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		Pelayan Publik (SIPP)		B06: 1. Sosialisasi Pedoman Pengisian SIPP 2. Seluruh Unit Utama dan kanwil sudah mengisi informasi layanan publik di laman SIPP	B06 : 1. Laporan Sosialisasi 2. Screenshot laman SIPP Unit Utama 3. Screenshot laman SIPP Kanwil	
				B09 : Monitoring dan Evaluasi informasi layanan publik pada laman SIPP	B09 : Laporan Monitoring dan evaluasi	
				B12 : Pelaporan	B12 : Laporan	
14	Penerapan Sertifikat Elektronik di lingkungan Kemenkumham	Terselenggaranya Sertifikat Elektronik di lingkungan Kemenkumham	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi di berbagai layanan sistem elektronik dan memberikan sisi keamanan informasi di lingkungan Kemenkumham	B09: Laporan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di 3 Unit Eselon 1 Kemenkumham	B09: Dokumen Laporan	
				B12: Laporan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di 11 Unit Eselon 1 Kemenkumham	B12: Dokumen Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
15	Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya nilai indeks SPBE Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya pelayanan dan pelaksanaan berbasis elektronik secara efektif dan efisien	B06: Pembentukan TIM penilaian mandiri SPBE	B06: SK TIM Penilaian Mandiri SPBE	
				B09: Mengumpulkan data dukung dan Melaksanakan penilaian mandiri	B09: Dokumen pendukung penilaian Unit Eselon I dan Laporan Pelaksanaan	
				B12: Unggah data dukung Situs SPBE Kemenpan dan RB	B12: <i>Capture</i> Unggah data dukung	
16	Membangun Aplikasi Persuratan yang baru	Terwujudnya aplikasi yang sesuai dengan Tata Naskah Dinas Kumham	Terlaksananya Penggunaan aplikasi persuratan yang baru oleh seluruh satuan Kerja di lingkungan Kumham yang sesuai dengan Tata Naskah Dinas Kumham	B03: Perancangan Struktur <i>Database</i> aplikasi persuratan beserta Relasionalnya	B03: <i>Screenshot Database</i>	
				B09: Pembangunan aplikasi persuratan yang baru sesuai alur implementasi Sertifikat Elektronik dan Tata Naskah Dinas	B09: <i>Screenshot</i> aplikasi persuratan yang baru	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Uji coba, <i>soft launching</i> dan Implementasi	B12: Laporan	
17	Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang dukungan manajemen di Setjen dan Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dalam bidang dukungan manajemen di wilayah	Terlaksananya pendidikan/pelatihan dukungan manajemen di wilayah	B03: 1. <i>Workshop</i> IKPA 2. <i>Workshop</i> SIPP	B03: Laporan Kegiatan	
				B06: 1. <i>Workshop</i> SPIP di wilayah 2. Sosialisasi Rencana Strategis Kemenkumham 3. <i>Workshop</i> Arsip aktif dan arsip inaktif	B06: Laporan Kegiatan	
				B09: 1. <i>Workshop</i> keprotokoleran 2. <i>Workshop</i> Sipastiku 3. <i>Workshop</i> Kehumasan	B09: Laporan Kegiatan	
				B12: 1. Sosialisasi SPBE di wilayah 2. <i>Workshop</i> Pemanfaatan TI di Kanwil	B12: Laporan Kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
18	Penyusunan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Rpermenkumham tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	Terselesaikannya Permenkumham tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	B03: Pembahasan Rpermen tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	B03: 1.Undangan kegiatan 2.Daftar Hadir 3.Notula 4.Dokumentasi 5.Draf Rpermen	
				B06: Pengundangan Permenkumham tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	B06: Permenkumham tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	
				B09: Sosialisasi Permenkumham	B09: Laporan penyelenggaraan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	Sosialisasi (memuat undangan kegiatan, dokumentasi, daftar hadir)	
19	Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui implementasi <i>Corporate University</i>	Terlaksananya penyelenggaraan <i>Corporate University</i> dalam peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Terbinanya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui penyelenggaraan <i>Corporate University</i> dalam peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	<p>B03: 1. Rapat persiapan bersama BPSDM 2. Penyusunan materi kegiatan penyelenggaraan <i>Corporate University</i></p> <p>B06: Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan <i>Corporate University</i> di 33 Kanwil, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>B09: Evaluasi Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan</p>	<p>B03: 1. Dokumentasi rapat penyusunan materi 2. Materi kegiatan</p> <p>B06: Dokumentasi rapat penyusunan materi (undangan, notula, daftar hadir)</p> <p>B09: Laporan evaluasi Pelaksanaan kegiatan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p><i>Corporate University</i> di 33 Kanwil, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>B12: Penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan <i>Corporate University</i></p>	<p>penyelenggaraan <i>Corporate University</i></p> <p>B12: Laporan kegiatan penyelenggaraan <i>Corporate University</i> dalam peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan</p>	
20	Penggunaan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah	Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki Hak Akses Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Perancang Kemenkumham baik pusat maupun wilayah mendapatkan hak akses Seluruh Perancang di luar Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan hak akses 	B03: Laporan Pemberian Hak Akses	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: Pilot Project penggunaan sistem informasi perancang (penilaian angka kredit) oleh 60 perancang di kemenkumham dan 40 perancang di luar kemenkumham	B06: Laporan uji coba pilot project	
				B09: 1. Penggunaan Sistem Informasi Jabatan Perancang oleh Perancang Kemenkumham baik pusat maupun wilayah 2. Penggunaan Sistem Informasi Jabatan Perancang oleh Perancang di luar Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Penggunaan Hak Akses	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM						
21	Mendukung kemudahan berusaha di Indonesia melalui pembentukan peraturan mengenai tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta pembangunan aplikasi pendukung layanan	1. Terlaksananya penyusunan peraturan mengenai tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	Tersusunnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	<p>B03: Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK</p> <p>B06: Finalisasi dan penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK</p>	<p>B03: 1. Laporan pembahasan Rancangan Permenkumham (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Dokumen Rancangan Permenkumham</p> <p>B06: 1. Laporan finalisasi Rancangan Permenkumham (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Dokumen Permenkumham yang sudah ditandatangani</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		2. Terlaksananya pembangunan aplikasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU online	Terbangunnya aplikasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU online	<p>B03: Pembangunan aplikasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU online</p> <p>B06: Aplikasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK yang terintegrasi ke sistem layanan AHU online siap digunakan</p> <p>B09: Evaluasi penggunaan aplikasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU online</p>	<p>B03: Laporan progres pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>B06: Laporan akhir pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi setelah <i>live</i>)</p> <p>B09: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
22	Mendukung kemudahan berusaha di Indonesia melalui pembangunan Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU online	Terlaksananya pembangunan Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus	Terbangunnya Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus	B03: Pembangunan Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus	B03: Laporan pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi)	
				B06: Finalisasi dan implementasi pemanfaatan Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus	B06: Laporan finalisasi dan implementasi pemanfaatan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi)	
				B09: Evaluasi implementasi Aplikasi Pendaftaran dan Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus	B09: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
23	Peningkatan pemahaman dan keterbukaan informasi terkait data jaminan fidusia berdasarkan Permenkumham 17/2020	Tersampainya informasi mengenai layanan permohonan data jaminan fidusia	Meningkatnya pemanfaatan penggunaan layanan permohonan data jaminan fidusia	B03: Koordinasi dengan OJK mengenai pelaksanaan webinar tentang pemanfaatan data jaminan fidusia sebagai langkah pencegahan penjaminan ulang kepada UMK, lembaga finansial dan masyarakat	B03: Laporan Koordinasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06: Pelaksanaan webinar tentang pemanfaatan data jaminan fidusia sebagai langkah pencegahan penjaminan ulang kepada UMK, lembaga finansial, dan masyarakat (Periode I)	B06: Laporan pelaksanaan kegiatan webinar periode I (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09: Pelaksanaan webinar tentang pemanfaatan data jaminan fidusia	B09: Laporan pelaksanaan kegiatan webinar periode II (lampiran: surat undangan,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				sebagai langkah pencegahan penjaminan ulang kepada UMK, lembaga finansial, dan masyarakat (Periode II)	daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12: Evaluasi Pelaksanaan webinar tentang pemanfaatan data jaminan fidusia sebagai langkah pencegahan penjaminan ulang kepada UMK, lembaga finansial, dan masyarakat Periode I dan II	B12: Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan webinar periode I dan II (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
24	Pengembangan manajemen data penanganan permintaan dan perjanjian <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA) dan Ekstradisi berbasis digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja	Peningkatan kualitas <i>database</i> penanganan permintaan dan perjanjian MLA dan Ekstradisi berbasis digital dalam aplikasi SIMJa-OP	Tersedianya <i>database</i> penanganan permintaan dan perjanjian MLA dan Ekstradisi berbasis digital yang komprehensif dalam aplikasi SIMJa-OP	B03: 1. 100% data penanganan permintaan MLA dan Ekstradisi (tahun 2013 s.d. Maret 2020) terinput ke dalam aplikasi SIMJa-OP 2. Penetapan Permenkumham	B03: 1. Laporan progres input data penanganan permintaan MLA dan Ekstradisi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
	Otoritas Pusat (SIMJa-OP)			tentang Tata Cara dan Syarat Khusus Pemenuhan Permintaan MLA di Kementerian Hukum dan HAM	2. Dokumen Permenkumham yang sudah ditandatangani	
				B06: Koordinasi penyempurnaan sistem manajemen data perjanjian MLA dan Ekstradisi dalam aplikasi SIMJa-OP	B06: Laporan koordinasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09: 1. Penyempurnaan sistem input data perjanjian MLA dan Ekstradisi dalam aplikasi SIMJa-OP	B09: Laporan hasil penyempurnaan sistem input data (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi)	
				B12: 100% data perjanjian MLA dan Ekstradisi (tahun 2013 s.d. Desember 2021) terinput ke dalam aplikasi SIMJa-OP	B12: Laporan hasil input data perjanjian MLA dan Ekstradisi (lampiran: surat undangan, daftar	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					hadir, notula, dokumentasi foto)	
25	Implementasi Konvensi Apostille melalui pembentukan peraturan mengenai tata cara layanan legalisasi apostille, serta pembangunan aplikasi pendukung layanan	1. Terlaksananya penyusunan peraturan mengenai tata cara layanan legalisasi apostille	Tersusunnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Layanan Legalisasi Apostille	<p>B03: Koordinasi awal mengenai penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Layanan Legalisasi Apostille</p> <p>B06: Penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Layanan Legalisasi Apostille</p> <p>B09: Penyusunan dan pembahasan lanjutan Rancangan</p>	<p>B03: 1. Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Laporan progres penyusunan Rancangan Permenkumham (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>B06: Laporan progres penyusunan Rancangan Permenkumham (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>B09: Laporan finalisasi Rancangan Permenkumham</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Permenkumham tentang Tata Cara Layanan Legalisasi Apostille	(lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12: Finalisasi dan penetapan Permenkumham Penyusunan Rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Layanan Legalisasi Apostille	Dokumen Permenkumham yang sudah ditandatangani	
		2. Terlaksananya pembangunan aplikasi legalisasi apostille yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU <i>Online</i>	Terbangunnya aplikasi legalisasi apostille yang terintegrasi ke dalam sistem layanan AHU <i>Online</i>	B03: Pembahasan pembangunan aplikasi legalisasi apostille	B03: Laporan pembahasan pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B06: Pembangunan aplikasi legalisasi apostille	B06: Laporan progres pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Finalisasi pembangunan dan uji coba aplikasi legalisasi apostille	B09: Laporan finalisasi pembangunan dan uji coba aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi saat uji coba)	
				B12: Aplikasi legalisasi apostille siap digunakan	B12: Laporan akhir pembangunan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi yang sudah live)	
26	Pemanfaatan data kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang terintegrasi dengan instansi terkait	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kewarganegaraan dan perwarganegaraan melalui pemanfaatan data kewarganegaraan dan perwarganegaraan	Tersedianya data Kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang terintegrasi dengan instansi terkait secara <i>real time</i>	B03: 1. Pengembangan aplikasi kewarganegaraan dan pewarganegaraan untuk rencana integrasi data	B03: Laporan pengembangan aplikasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, tangkapan layar tampilan aplikasi)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		yang terintegrasi dengan instansi terkait		2. Pembahasan terkait pembentukan MoU dan PKS antara Ditjen AHU dengan instansi terkait		
				B06: Penandatanganan MoU dan PKS antara Ditjen AHU dengan instansi terkait	B06: 1. Laporan penandatanganan MoU dan PKS (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Dokumen MoU dan PKS yang sudah ditandatangani	
				B09: Pemanfaatan data kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang terintegrasi dengan instansi terkait	B09: Laporan pemanfaatan data (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12 Evaluasi atas pemanfaatan data kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang terintegrasi dengan instansi terkait	B12: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
27	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PPNS di Kantor Wilayah	Terlaksananya pemanfaatan aplikasi PPNS di Kantor Wilayah yang terintegrasi dengan sistem layanan AHU Online	Meningkatnya pemahaman terkait pemanfaatan aplikasi PPNS di Kantor Wilayah yang terintegrasi dengan sistem layanan AHU Online	B03: Koordinasi pelaksanaan pembukaan akses aplikasi PPNS untuk Kantor Wilayah B06: Pelaksanaan webinar pelatihan pemanfaatan aplikasi PPNS untuk Kantor Wilayah B09 Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan pemanfaatan aplikasi PPNS di Kantor Wilayah	B03: Laporan kegiatan koordinasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) B06: Laporan pelaksanaan webinar (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) B09 Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
28	Terpantaunya perkembangan layanan AHU di wilayah oleh Kantor Wilayah	Terlaksananya pengembangan pengembangan <i>Dashboard</i> Data Statistik Layanan AHU di wilayah yang dapat diakses oleh seluruh Kantor Wilayah	Terbangunnya <i>Dashboard</i> Data Statistik Layanan AHU di wilayah yang dapat diakses oleh seluruh Kantor Wilayah	B03: Pembangunan <i>Dashboard</i> Data Statistik Layanan AHU di wilayah yang dapat diakses oleh seluruh Kantor Wilayah	B03: 1. Laporan pembangunan <i>Dashboard</i> (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Tangkapan layar tampilan <i>Dashboard</i>	
				B06: Penyebaran informasi <i>Dashboard</i> Data Statistik Layanan AHU di wilayah yang dapat diakses oleh seluruh Kantor Wilayah	B06: Laporan penyebaran informasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09: Evaluasi penggunaan <i>Dashboard</i> Data Statistik Layanan AHU untuk Kantor Wilayah dan penetapan langkah lanjutan	B09: Laporan evaluasi penggunaan <i>Dashboard</i> dan penetapan langkah lanjutan (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
29	Peningkatan kapasitas SDM di pusat dan wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>	Tersampainya informasi tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) dan Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK kepada seluruh Kantor Wilayah	Terciptanya SDM yang unggul dalam hal peyampaian informasi dan publikasi kepada masyarakat terkait Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) dan Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dengan unit terkait Pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan koordinasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pemilik Manfaat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) Laporan pelaksanaan kegiatan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pemilik Manfaat (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan koordinasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Kriteria untuk UMK dengan unit terkait</p> <p>2. Pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK dengan unit terkait;</p>	<p>Memenuhi Kriteria untuk UMK (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>2. Laporan pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p>	
				<p>B09: Evaluasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan Pendaftaran Perseroan</p>	<p>B09: 1. Laporan evaluasi pelaksanaan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pemilik Manfaat (lampiran: surat undangan, daftar</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK dengan unit terkait	<p>hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>2. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan webinar <i>Training of Trainer</i> tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN						
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui implementasi <i>Corporate University</i>	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM Pemasyarakatan di Pusat dan Wilayah: <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Peningkatan Pemahaman SPPT-TI 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Pemasyarakatan di Pusat dan Wilayah: <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Meningkatnya Pemahaman SPPT-TI 	B03: Pelaksanaan Bimtek B06: Pelaksanaan Bimtek B09: Pelaksanaan Bimtek B12: Evaluasi	B03: Laporan Pelaksanaan Bimtek B06: Laporan Pelaksanaan Bimtek B09: Laporan Pelaksanaan Bimtek B12: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	
31	Penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> Barang Sitaan (Basan) Barang Rampasan (Baran) pada Rutan dan Rupbasan	Menurunnya jumlah <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload Basan Baran</i> dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum	Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Rutan dan Rupbasan	B03: Perjanjian Kerjasama Penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan <i>Overload</i> Basan Baran dengan APH terkait B06: 1. Pelaksanaan pertukaran data <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> basan baran berbasis Teknologi	B03: Dokumen Perjanjian Kerjasama B06: 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data 2. Laporan Pelaksanaan pemindahan tahanan dan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Informasi antar instansi penegak hukum 2. Pelaksanaan pemindahan tahanan dan eksekusi basan baran	eksekusi basan baran	
				B09 1. Pelaksanaan pertukaran data basan baran berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum 2. Pelaksanaan pemindahan tahanan dan eksekusi basan baran	B09 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data 2. Laporan Pelaksanaan pemindahan tahanan dan eksekusi basan baran	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
32	Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi	1. Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat 2. Pengembangan lapas produktif sesuai dengan	B03 1. Penyusunan Modul Pelaksanaan Standar Vokasi 2. Pemetaan kanwil	B03 1. Dokumen Modul Pelaksanaan Standar Vokasi 2. Data hasil pemetaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			kearifan lokal wilayah masing-masing 3. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	dan UPT pelaksana Pembinaan Narapidana melalui Saran Asimilasi dan Edukasi 3. Penetapan Menteri kategori Pilot Project Lapas Produktif dan 4. Penetapan Dirjen Pemasarakatan terkait Lapas yang melaksanakan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi 5. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi	3. Keputusan Menteri terkait <i>Pilot Project</i> Lapas Produktif 4. Keputusan Dirjen terakit Lapas Pelaksana pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi 5. Laporan pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi	
				B06 1. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Implementasi Lapas Produktif	B06 1. Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Laporan Implementasi Lapas Produktif	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>pada UPT Pilot Project</p> <p>3. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>	<p>pada UPT Pilot Project</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>	
				<p>B09</p> <p>1. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi</p> <p>2. Implementasi Lapas Produktif</p> <p>3. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>	<p>B09</p> <p>1. Pelatihan narapidana yang bersertifikasi</p> <p>2. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>	
				<p>B12</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>B12</p> <p>Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	
33	Penanganan <i>over crowding</i> melalui Redistribusi	1. Menurunnya Kantor Wilayah yang UPT Lapas dengan <i>over</i>	Terlaksananya pemindahan UPT Lapas dengan tingkat	B03 Pemetaan UPT dengan jumlah <i>over</i>	B03 Laporan hasil pemetaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		<i>crowding</i> di atas 300%	<i>over crowding</i> di atas 300%	<i>crowding</i> di atas 300%		
				B06 Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas <i>Over crowding</i> di atas 300% ke Lapas yang tidak <i>over crowding</i> di dalam atau luar wilayah	B06 Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
				B09 Pelaksanaan Redistribusi Narapidana dari Lapas <i>Over crowding</i> di atas 300% ke Lapas yang tidak <i>over crowding</i> di dalam atau luar wilayah	B09 Laporan Pelaksanaan Redistribusi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		2. Penempatan narapidana narkotika kategori bandar ke Lapas	Terlaksananya Penempatan narapidana narkotika kategori bandar ke	B06: Penempatan narapidana narkotika kategori	B06: Laporan Pelaksanaan Penempatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		<i>Super Maximum Security</i>	Lapas <i>Super Maximum Security</i>	bandar ke Lapas <i>Super Maximum Security</i>		
				B12: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	B12: Laporan Monitoring Pelaksanaan	
34	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu dan penyalahguna narkotika memperoleh layanan Rehabilitasi Narkotika	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	B03: Mentoring tata kelola penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di 3 Wilayah	B03: Laporan pelaksanaan Mentoring	
				B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di 3 Wilayah	B06: Laporan supervisi	
				B09: Supervisi teknis layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan pada 3 Wilayah	B09: Laporan supervisi	
				B12: Evaluasi penyelenggaraan	B12: Laporan Evaluasi penyelenggaraan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	
35	Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Optimalisasi fungsi kelompok masyarakat (pokmas)	Terlaksananya fungsi pokmas	B03: Penyusunan Pedoman Kerja Pokmas	B03: Dokumen Pedoman Kerja Pokmas	
				B06: 1. Rakor/Bimtek/Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2. Penyusunan Rencana Kerja Pokmas 3. Implementasi Rencana Kerja Pokmas	B06: 1. Laporan Rakor/Bimtek/Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2. Dokumen Rencana Kerja Pokmas 3. Laporan Implementasi Rencana Kerja Pokmas	
				B09: Implementasi Rencana Kerja Pokmas	B09: Laporan Implementasi	
				B12: Monev Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui pemberdayaan Kelompok masyarakat (pokmas)	B12: Laporan Monev	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
36	<i>Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project</i>	Pelaksanaan pertukaran data berbasis Teknologi Informasi dengan antar institusi penegak hukum melalui SPPT-TI	Terlaksananya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Lapas/Rutan/Bapas <i>Pilot Project</i> (Jumlah UPT Target Implementasi SPPT TI menyesuaikan dengan Target Polhukam)	<p>B03: Penetapan UPT target SPPT TI tahun 2021</p> <p>B06: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI</p> <p>B09: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi</p>	<p>B03: SK Penetapan UPT Lapas/Rutan/Bapas <i>Pilot Project</i> Implementasi SPPT-TI</p> <p>B06: 1. Laporan hasil monitoring; 2. Laporan Bimtek 3. Laporan Rapat koordinasi</p> <p>B09: 1. Laporan hasil monitoring; 2. Laporan Bimtek 3. Laporan <i>Rapat</i></p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI	<i>koordinasi</i>	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	
37	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan kamtib dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan	1. Meningkatnya Koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	Seluruh Lapas dan Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B03 : 360 Lapas dan 167 Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi Terkait	B03: 1. Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait 2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06 : 360 Lapis dan 167 Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B06: 1. Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait 2. Dokumen pertukaran informasi dan data	
				B09 : 360 Lapis dan 167 Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B09: 1. Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait 2. Dokumen pertukaran informasi dan data	
				B12 : Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib)	Seluruh Lapis dan Rutan telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan	B03 : 1. 360 Lapis dan 167 Rutan telah melaksanakan deteksi dini	B03: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		yang bersumber dari dalam maupun dari luar	Keamanan dan Ketertiban	gangguan kamtib 2. Melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban	gangguan kamtib 2. Instrumen deteksi dini yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan	
				B06 : 360 Lapis dan 167 Rutan telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib	B06: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Instrumen deteksi dini yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan	
				B09: 360 Lapis dan 167 Rutan telah melaksanakan deteksi dini gangguan kamtib	B09: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Instrumen deteksi dini yang diisi oleh Agen Unit Intelijen	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					Pemasyarakatan	
				B12 : Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B12: 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Instrumen deteksi dini yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasyarakatan	
		3. Inspeksi mendadak dan tes urine bagi petugas dan narapidana /tahanan/anak	Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urine bagi petugas dan narapidana /tahanan/anak	B03 : 1. Sebanyak 30% UPT Pemasyarakatan: 98 Lapas, 50 Rutan dan 10 LPKA telah melaksanakan inspeksi mendadak 2. Sebanyak 30% UPT Pemasyarakatan: 98 Lapas, 50 Rutan dan 10 LPKA telah melaksanakan Tes Urine	B03: 1. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPK 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	
				B06 : 1. Sebanyak 60% UPT Pemasyarakatan: 196 Lapas, 100 Rutan dan 20 LPKA	B06: 1. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>telah melaksanakan inspeksi mendadak</p> <p>2. Sebanyak 60% UPT Pemasarakatan: 196 Lapas, 100 Rutan dan 20 LPKA telah melaksanakan Tes Urine</p>	<p>Lapas, Rutan dan LPKA</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas dan narapidana/ tahanan/Anak yang terindikasi menggunakan Narkoba.</p>	
				<p>B09 :</p> <p>1. Sebanyak 100% UPT Pemasarakatan: 360 Lapas, 167 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan inspeksi mendadak</p> <p>2. Sebanyak 100% UPT Pemasarakatan: 360 Lapas, 167 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan Tes Urine</p>	<p>B09:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan inspeksi mendadak dan Tes Urine bagi petugas dan narapidana/tahanan/ Anak yang terindikasi menggunakan Narkoba</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12 : Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	
		4. Validasi dan akurasi data keamanan	Meningkatkan validitas dan akurasi data keamanan	B03 : 1. Sosialisasi pelaksanaan penginputan Fitur Keamanan pada SDP 2. Pembentukan Operator Fitur Keamanan pada SDP	B03: SK Pembentukan/ Surat Perintah Pembentukan Operator SDP Fitur Keamanan	
				B06 : Sebanyak 30% UPT Masyarakat: 98 Lapas, 50 Rutan dan 10 LPKA telah melaksanakan penginputan seluruh data keamanan pada SDP Fitur Keamanan	B06: Laporan Pelaksanaan Penginputan pada SDP Fitur Keamanan (Manajemen penempatan, Register H, Register F, Perlengkapan Pengamanan , lalu lintas Portir)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>B09 : Sebanyak 60% UPT Pemasarakatan: 196 Lepas, 100 Rutan dan 20 LPKA telah melaksanakan penginputan seluruh data keamanan pada SDP Fitur Keamanan</p> <p>B12 : Sebanyak 100% UPT Pemasarakatan: 360 Lepas, 167 Rutan dan 33 LPKA telah melaksanakan penginputan seluruh data keamanan pada SDP Fitur Keamanan</p>	<p>B09: Laporan Pelaksanaan Penginputan pada SDP Fitur Keamanan (Manajemen penematan, Register H, Register F, Perlengkapan Pengamanan , lalu lintas Portir)</p> <p>B12: Laporan Pelaksanaan Penginputan pada SDP Fitur Keamanan (Manajemen penematan, Register H, Register F, Perlengkapan Pengamanan , lalu lintas Portir)</p>	
		5. UPT Pemasarakatan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedisiplinan Petugas 2. Pelaksanaan Tugas Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U). 	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Lepas, Rutan, LPKA, Bapas dan Rupbasan telah membentuk Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Surat Keputusan Tim satuan Tugas Operasiona 2.Kepatuhan Internal (Satopspatnal) 3.Kartu Tanda Anggota (KTA) Satops Patnal 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		sesuai Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan	3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan 4. Pelaksanan Penjagaan. 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling. 6. Pelaksanaan Pengawalan. 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/tahanan/ Anak Dalam Kamar Hunian. 8. Layanan Penyediaan Makanan dan 9. Kebutuhan Dasar Lainnya 10. Tertib administrasi dan keuangan	(Satopspatnal) sesuai Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan 2. <i>Workshop</i> Satopspatnal		
				B06 : Sebanyak 164 Lepas, 84 Rutan, 17 LPKA, 45 Bapas dan 32 Rupbasan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	B06 : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	
				B09 : Sebanyak 360 Lepas, 167 Rutan, 33 LPKA, 90 Bapas dan 64 Rupbasan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional	B09 : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				kepatuhan internal (Satopspatnal)		
				B12 : Monitoring dan Evaluasi	B12 : Laporan Monev	
38	Pembangunan baru Lapas Nusa Kambangan (Kanwil Jawa Tengah)	Pelaksanaan Pembangunan Lapas baru sesuai Arahan Presiden	Terlaksananya pembangunan baru (Kanwil Jawa Tengah) : 1. Lapas Maksimum bagi narapidana teroris di Nusakambangan 2. Lapas Maksimum bagi Napi Narkotika di Nusakambangan 3. Lapas Minimum di Nusakambangan	B03 1. Pelaksanaan lelang perencana dan MK/Pengawas 2. Penentuan Pemenang lelang Pelaksanaan lelang perencana dan MK/Pengawas	B03 1. Laporan pelaksanaan lelang perencana dan MK/Pengawas 2. Dokumen kontrak	
				B06 1. Pelaksanaan lelang pelaksana 2. Penentuan Pemenang lelang pelaksana	B06 1. Laporan pelaksanaan lelang pelaksana 2. Dokumen kontrak	
				B09 50 % Progress Pelaksanaan Pembangunan	B09 1. Laporan Pelaksanaan pembangunan 2. Kurva S	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12 1. 100 % Progress Pelaksanaan Pembangunan 2. BAST Hasil Pekerjaan dan Final Hand Over (FHO)	B12 1. Laporan Pelaksanaan Pembangunan 2. Kurva S 3. BAST Hasil Pekerjaan dan Dokumen	
39	Pengembalian Fungsi Rutan di: 1. Kanwil Sumatera Utara (Rutan Perempuan Kelas IIA Medan) 2. Kanwil Banten (Rutan Kelas IIB Serang) 3. Kanwil DKI Jakarta (Rutan Kelas I Salemba, Rutan Kelas I Pondok Bambu) 4. Kanwil Jawa Tengah (Rutan Kelas IIA Pekalongan)	Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan ke Lapas sekitar pada 5 (lima) Rutan <i>Pilot Project</i>	Terlaksananya Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan ke Lapas sekitar pada 5 (lima) Rutan <i>Pilot Project</i>	B03: Sosialisasi Surat Edaran Pengembalian Fungsi Rutan B06: 1. Inventarisasi data narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan 2. Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan B09: Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan	B03: Laporan Sosialisasi Surat Edaran Pengembalian Fungsi Rutan B06: 1. Data Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan 2. Laporan pelaksanaan pemindahan B09: Laporan pelaksanaan pemindahan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Monitoring dan Evaluasi Pengembalian Fungsi Rutan melalui Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan pada Rutan Pilot Project	B12: Laporan Monev Pengembalian Fungsi Rutan melalui Pemindahan Narapidana sisa pidana lebih dari 12 bulan pada Rutan Pilot Project	
40	Penanganan <i>over crowding</i> : Renovasi di: 1. Kanwil Sulawesi Tenggara 2. Kanwil Sulteng 3. Kanwil Sulawesi Utara 4. Kanwil Sumatera Utara 5. Kanwil Jambi 6. Kanwil Sulawesi Barat 7. Kanwil Jawa Tengah 8. Kanwil Lampung 9. Kanwil Riau 10. Kanwil Kalimantan Timur/Kalimantan Utara	Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/renovasi UPT Pemasarakatan dalam rangka : a. Penanganan bencana alam/tanggap darurat, penanganan b. Overcrowding dan peningkatan mutu bangunan	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi/renovasi pada: 1. Kanwil Sulawesi Tenggara o Rupbasan Kelas I Kendari o Rutan Kendari 2. Kanwil Sulteng o Lapas Kelas II Leok o Lapas kelas IIB Luwuk 3. Kanwil Sulawesi Utara o Lapas Kelas IIA Manado 4. Kanwil Sumatera Utara	B03 1. Pelaksanaan lelang perencana dan MK/Pengawas 2. Penentuan Pemenang lelang 3. Pelaksanaan lelang perencana dan MK/ Pengawas 4. Pelaksanaan lelang pelaksana 5. Penentuan Pemenang lelang pelaksana	B03 1. Laporan pelaksanaan lelang perencana dan MK/Pengawas dan Dokumen kontrak 2. Laporan pelaksanaan lelang pelaksana dan dokumen kontrak	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
	11. Kanwil Kalimantan Tengah 12. Kanwil Jawa Timur 13. Kanwil Papua Barat 14. Kanwil Jawa Barat 15. Kanwil Sumatera Selatan 16. Kanwil D.I Yogyakarta 17. Kanwil Aceh 18. Kanwil NTB 19. Kanwil NTT 20. Kanwil Kalimantan Selatan 21. Kanwil Banten		<ul style="list-style-type: none"> ○ Rutan Kabanjahe ○ Lapas Kelas IIA Pancur Batu 5. Kanwil Jambi <ul style="list-style-type: none"> ○ Lapas Kelas IIA Jambi ○ Lapas Perempuan Jambi 6. Kanwil Sulawesi Barat <ul style="list-style-type: none"> ○ Lapas Kelas III Mamasa 7. Kanwil Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> ○ Rutan Boyolali ○ Bapas Klaten 8. Kanwil Lampung <ul style="list-style-type: none"> ○ Lapas Gunung Sugih 9. Kanwil Riau <ul style="list-style-type: none"> ○ LPKA Pekanbaru ○ Lapas kelas IIA Bagan Siapi-api ○ Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai 10. Kanwil Kalimantan			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Timur/Kalimantan Utara <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas IIA Balikpapan 11. Kanwil Kalimantan Tengah <ul style="list-style-type: none"> ○ Bapas kelas I Palangkaraya ○ Lepas Kelas IIA Palangkaraya 12. Kanwil Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> ○ Rupbasan Surabaya 13. Kanwil Papua Barat <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas III Teminabuhan ○ Lepas Perempuan Manokwari 14. Kanwil Jawa Barat <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas IIA Banceuy 15. Kanwil Sumatera Selatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas III pagaralam 16. Kanwil D.I Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> ○ Bapas Kelas I 			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN	
			Yogyakarta 17. Kanwil Aceh <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas kelas IIB Kutacane ○ LPKA banda Aceh ○ Lepas Lhokseumawe 18. Kanwil NTB <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas IIA Mataram 19. Kanwil NTT <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Waikabubak 20. Kanwil Kalimantan Selatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas batulicin (Tanah Bumbu) 21. Kanwil Banten <ul style="list-style-type: none"> ○ Lepas Kelas I Tangerang 				
				B06 25 % Progress Pelaksanaan Pembangunan	B06 1. Laporan Progres Pelaksanaan pembangunan dan Foto 2. Kurva S		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09 75 % Progress Pelaksanaan Pembangunan	B09 1. Laporan Progres Pelaksanaan pembangunan dan Foto 2. Kurva S	
				B12 1. 100 % Progress Pelaksanaan Pembangunan 2. BAST Sementara Hasil Pekerjaan dan Dokumen Profesional Hand Over (PHO)	B12 1. Laporan Progres Pelaksanaan pembangunan dan Foto 2. Kurva S 3. BAST atau Dokumen PHO	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI						
41	Peningkatan Kapasitas SDM Imigrasi melalui Implementasi <i>Corporate University</i>	Meningkatkan kapasitas SDM Imigrasi di pusat dan wilayah	Peningkatan kapasitas SDM Imigrasi di pusat dan wilayah	B03: Penyusunan Materi Peningkatan kapasitas SDM (PPNS, Intelijen, Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian) di pusat dan wilayah Jawa B06: Peningkatan kapasitas SDM (PPNS, Intelijen,	B03: Materi Peningkatan Kapasitas SDM B06: Laporan Bimtek/workshop/ sosialisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Analisis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian) Wilayah Sumatera</p> <p>B09: Peningkatan kapasitas SDM (PPNS, Intelijen, Analisis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi</p> <p>B12: Peningkatan kapasitas SDM (PPNS, Intelijen, Analisis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian) Wilayah Maluku, Papua, Bali, NTT, NTB, Papua Barat</p>	<p>B09: Laporan Bimtek/workshop/ sosialisasi</p> <p>B12: Laporan Bimtek/workshop/ sosialisasi</p>	
42	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelayanan prima 2. Terlaksananya penegakan hukum bidang keimigrasian sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Administrasi Tertib Penegakan Hukum (Gakkum) 2. Terwujudnya Internalisasi dan 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim 2. Penyusunan SOPAP Tata Cara Penyidikan Keimigrasian 	<p>B03: Laporan Dokumentasi</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Penegakan Hukum 3. Pelaksana Teknis Pelayanan Paspor dapat mengaplikasikan SOP Penerbitan Paspor sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2020 4. Terlaksananya penerbitan visa elektronik sesuai SOPAP	3. Tersusunnya SOPAP Pendetensian dan Pendeportasian untuk Ruang Detensi Imigrasi 4. Penyusunan Revisi SOP Penerbitan Paspor, 5. Uji lapangan dan penerapan pada Siskim 2 oleh Sistik secara kesisteman, harmonisasi dan persetujuan SOP Penerbitan Paspor 6. Persiapan penyusunan SOPAP penerbitan Visa Elektronik		
				B06: 1. Tersusunnya SOPAP Tata Cara Penyidikan Keimigrasian 2. Terwujudnya SOPAP Pendetensian dan Pendeportasian	B06: 1. SOPAP Tata Cara Penyidikan Keimigrasian 2. SOPAP Pendetensian dan Pendeportasian untuk Ruang Detensi Imigrasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				untuk Ruang Detensi Imigrasi 3. Revisi SOP penerbitan paspor ditetapkan oleh Direktur Jendetal Imigrasi dan diterapkan oleh seluruh Pelaksana teknis 4. Terwujudnya SOPAP penerbitan Visa Elektronik	3. SOP penerbitan paspor ditetapkan oleh Direktur Jendetal Imigrasi dan diterapkan oleh seluruh Pelaksana teknis 4. SOPAP penerbitan Visa Elektronik	
				B09: 1. Sosialisasi SOPAP Tata Cara Penyidikan Keimigrasian 2. Sosialisasi SOPAP Pendetensian dan Pendeportasian untuk Ruang Detensi Imigrasi 3. Monitoring dan Evaluasi SOP Penerbitan Paspor hasil revisi	B09: Laporan Dokumentasi	
				B12: 1. Evaluasi SOPAP Tata Cara	B12: Laporan Dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Penyidikan Keimigrasian 2. Evaluasi SOPAP Pendetensian dan Pendeportasian untuk Ruang Detensi Imigrasi 3. Monitoring dan Evaluasi SOP Penerbitan Paspor hasil revisi		
43	Meningkatnya kerja sama Keimigrasian antar Lembaga dalam rangka UU Cipta Kerja	Bertambahnya kerja sama keimigrasian antar lembaga	6 Dokumen kerja sama keimigrasian	B03: 1. Adanya <i>draft</i> atau <i>counter draft</i> tentang kerja sama keimigrasian 2. Terwujudnya kesepakatan kerja sama keimigrasian 3. Terlaksananya program-program dalam kesepakatan kerja sama keimigrasian B06: 1. Adanya <i>draft</i> atau <i>counter draft</i> tentang kerja sama keimigrasian	B03: 1. <i>Draft</i> atau <i>Counter Draft</i> Kerja Sama 2. PKS 3. Laporan pelaksanaan kerja sama B06: 1. <i>Draft</i> atau <i>Counter Draft</i> Kerja Sama 2. PKS	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				2. Terwujudnya kesepakatan kerja sama keimigrasian 3. Terlaksananya program-program dalam kesepakatan kerja sama keimigrasian	3. Laporan pelaksanaan kerja sama	
				B09: 1. Adanya <i>draft</i> atau <i>counter draft</i> tentang kerja sama keimigrasian 2. Terwujudnya kesepakatan kerja sama keimigrasian 3. Terlaksananya program-program dalam kesepakatan kerja sama keimigrasian	B09: 1. <i>Draft</i> atau <i>Counter Draft</i> Kerja Sama 2. PKS 3. Laporan pelaksanaan kerja sama	
				B12: Evaluasi Kerja Sama	B12: Dokumen dan Laporan Dokumentasi Kegiatan	
44	Penerapan <i>Pre-Arrival registration (Electronic Arrival Card)</i> bagi	Ditetapkannya kebijakan kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan <i>Pre-</i>	Terlaksananya kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan <i>Pre-Arrival</i>	B03: Penyusunan Permenkumham dan SE Dirjenim tentang	B03: 1. Laporan hasil rapat	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
	Orang Asing (Khusus Penumpang)	<i>Arrival Registration</i> sebelum masuk ke wilayah Indonesia	<i>Registration sebelum masuk ke wilayah Indonesia</i>	<p>Kebijakan Kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan Pre-Arrival Registration</p> <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Permenkumham tentang Kebijakan Kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan Pre-Arrival Registration Penerbitan SE Dirjenim tentang Kebijakan Kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan Pre-Arrival Registration Uji coba PreArrival Registration bagi orang asing yang masuk melalui 5 TPI (Kualanamu, Batam Center, Soekarno Hatta, 	<p>2. Surat usulan rancangan Permenkumham/ SE Dirjenim Pre-Arrival Registration</p> <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permenkumham tentang Kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan Pre- Arrival Registration di 5 TPI Utama SE Dirjenim tentang Kebijakan Kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan Pre-Arrival Registration Laporan hasil uji coba 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Juanda, Ngurah Rai)		
				B09: 1. Monitoring dan evaluasi <i>Pre-Arrival Registration</i> bagi orang asing yang masuk melalui 5 TPI (Kualanmu, Batam Center, Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai) 2. Implementasi <i>Pre-Arrival Registration</i> di seluruh TPI	B09: 1. Laporan monev dan dokumentasi 2. Laporan rapat hasil monev uji coba	
				B12: Evaluasi kebijakan kewajiban bagi Orang Asing untuk melakukan <i>Pre-Arrival Registration</i> sebelum masuk ke wilayah Indonesia	B12: Laporan hasil evaluasi	
45	Penyempurnaan aplikasi Izin Tinggal Keimigrasian secara menyeluruh	Tersedianya layanan izin tinggal keimigrasian yang handal dan akuntabel	Terlaksananya penyempurnaan aplikasi izin tinggal keimigrasian	B03: 1. Pembentukan Tim Penyempurnaan Aplikasi Izin	B03: 1. SK Tim 2. Laporan dan Dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		dalam proses pelayanan		<p>Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal Keimigrasian</p> <p>2. Internalisasi Uji Coba Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada 10 Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah yang membawahi</p> <p>3. Uji coba implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal di 10 Kanim</p> <p>4. Pemberitahuan pelaksanaan Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan</p>		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Izin Tinggal Keimigrasian pada 10 Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah yang membawahi		
				B06: Laporan pelaksanaan Uji coba Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada 10 Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah yang membawahi	B06: 1. Laporan internalisasi 10 Kanim dan Kanwil yang membawahi 2. Laporan Uji Coba 10 Kanim dan Kanwil yang membawahi	
				B09: 1. Penerbitan Surat Edaran Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Kantor	B09: 1. Surat Edaran 2. Laporan hasil implementasi seluruh Kanim	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Imigrasi dan Kantor Wilayah yang membawahi 2. Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah 3. Laporan Implementasi Penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah		
				B12: Evaluasi pelaksanaan penyempurnaan Sistem Izin Tinggal Keimigrasian pada seluruh layanan izin	B12: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				tinggal keimigrasian disesuaikan dengan parameter yang diberikan oleh masing-masing Kantor Imigrasi		
46	Penerapan sistem <i>Master Data Management</i>	Tergelarnya sistem <i>Master Data Management</i> di direktorat Jenderal Imigrasi	Tersedianya sistem <i>Data Master Management</i> (ketunggalan data dan ketunggalan layanan) pada Direktorat Jenderal Imigrasi	<p>B03: Analisa kebutuhan pembangunan sistem <i>Master Data Management</i></p> <p>B06: Pembangunan Sistem Master Data Management</p> <p>B09: Implementasi Sistem <i>Master Data Management</i></p> <p>B12: Monitoring dan evaluasi Sistem <i>Master Data Management</i></p>	<p>B03: Dokumen analisa kebutuhan sistem <i>Master Data Management</i></p> <p>B06: Laporan pelaksanaan pembangunan Sistem <i>Master Data Management</i></p> <p>B09: Laporan Implementasi Sistem <i>Master Data Management</i></p> <p>B12: Laporan hasil monitoring dan evaluasi sistem <i>Master Data Management</i></p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
47	Persiapan Piala Dunia Sepak Bola U-20 (Bulan Mei 2021) di Kantor Wilayah: 1. DKI Jakarta 2. Sumatera Selatan 3. Jawa Barat 4. Jawa Tengah 5. Jawa Timur Bali	Terlaksananya pemberian jalur khusus, masuk dan keluar wilayah RI bagi peserta asing pada acara piala dunia sepak bola U-20	Tersedianya kemudahan dan Fasilitas khusus utk proses masuk dan keluar wilayah RI bagi peserta asing pada acara Piala Dunia sepak bola U-20.	B03: 1. Pengajuan rencana peninjauan lapangan 2. Peninjauan lapangan kesiapan TPI Inventarisir permasalahan/ kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan peninjauan lapangan di TPI	B03: Dokumen pengajuan rencana kegiatan	
				B06: Evaluasi pelaksanaan proses masuk dan keluar wilayah RI bagi delegasi Piala Dunia Sepak Bola U-20	B06: Laporan pengawasan dan evaluasi	
48	Persiapan Moto GP Mandalika (Oktober 2021) Nusa Tenggara Barat di : 1. Kanwil DKI 2. Kanwil Bali Kanwil NTB	Terlaksananya pemberian jalur khusus, masuk dan keluar wilayah RI bagi peserta asing pada acara acara Moto GP Mandalika	Tersedianya kemudahan dan Fasilitas khusus utk proses masuk dan keluar wilayah RI bagi peserta asing pada	B09: 1. Pengajuan rencana peninjauan lapangan 2. Peninjauan lapangan kesiapan TPI	B09: 1. Dokumen pengajuan rencana kegiatan 2. Laporan hasil peninjauan lapangan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			acara Moto GP Mandalika	Inventarisir permasalahan/kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan peninjauan lapangan di TPI	Laporan dan hasil koordinasi dengan K/L terkait	
				B12: Evaluasi pelaksanaan proses masuk dan keluar wilayah RI bagi delegasi pada acara Moto GP Mandalika	B12: Laporan pengawasan dan evaluasi	
49	Prioritas Nasional Pembangunan Perbatasan di: 1. Kanwil Kalimantan Timur: Long Midang, Labang, Long Nawang dan Sei Nyamuk 2. Kanwil Kalimantan Barat: Sei Kelik 3. Kanwil Papua: Yetetkun 4. Kanwil NTT: Napan dan Oepoli (ditunda pembangunannya)	Terlaksananya pembangunan perbatasan di 8 PLBN Prioritas sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 percepatan pembangunan 11 PLBN.	1. Tersedianya perangkat <i>Border Control Management</i> (BCM) di 8 PLBN Prioritas. Terbentuknya Timpora di wilayah perbatasan	B03: Pembentukan Timpora di wilayah perbatasan B06: Koordinasi pengadaan perangkat BCM di 8 PLBN Prioritas B09: Distribusi perangkat BCM di 8 PLBN Prioritas B12: Evaluasi implementasi	B03: SK Timpora B06: Notula Rapat B09: Notula Rapat atau BAST Pendistribusian Perangkat BCM. B12: Laporan pelaksanaan kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
	Kanwil Kep Riau: Serasan			perangkat BCM di 8 PLBN Prioritas dan laporan Timpora		
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL						
50	Gerakan Tahun Paten Nasional	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap paten	Jumlah masyarakat yang memperoleh Diseminasi dan kemandirian tentang Paten	<p>B03: Persiapan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terkait IP dengan menggunakan virtual meeting/webinar/so cial media dan pembentukan program-program yang berkesinambungan</p> <p>B06: 1. Virtual/webinar terkait kasus paten di Indonesia patent classification 2. Virtual/webinar terkait bimbingan teknis garis besar patent drafting 3. <i>One Day Patent Drafting</i> (jika Pandemi Selesai)</p>	<p>B03: Laporan Rencana kegiatan virtual meeting : 1. Target perguruan tinggi, Litbang/sentra Kl/instansi pendidikan sejenis 2. Rencana Narasumber 3. <i>Timeline</i> 4. SK TIM Kegiatan</p> <p>B06: Laporan kegiatan dan jumlah peserta/responden</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Pendampingan menuju kemandirian Paten	B09: Laporan kegiatan dan jumlah peserta/responden	
				B12: Monitoring dan Evaluasi kegiatan virtual/webinar terkait Paten	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
51	Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual	Penyelesaian Permohonan Pendaftaran atau Pencatatan Kekayaan Intelektual	1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten sesuai Peraturan Perundang - Undangan dan Penyelesaian Backlog	B03: 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 2.500 2. Jumlah Penyelesaian <i>Backlog</i> 300	B03: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B06: 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 4.500 2. Jumlah Penyelesaian <i>Backlog</i> 600	B06: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 6.750 2. Jumlah Penyelesaian <i>Backlog</i> 900	B09: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B12: 1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten 9.000 2. Jumlah Penyelesaian <i>Backlog</i> 1.200	B12: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
			2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek sesuai Peraturan Perundang-Undangan	B03: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 15.000	B03: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B06: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek 20.000	B06: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek : 20.000	B09: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B12: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek : 20.000	B12: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
			3. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	B06: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis 2 (dua) Indikasi Geografis	B06: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B09: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sebanyak 3 (tiga) Indikasi Geografis	B09: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B12: Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis sebanyak 3 (tiga) Indikasi Geografis	B12: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			4. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	B03: 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 850	B03: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B06: 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	B06: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
				B09: 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan 9.000 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan	B09: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pendaftaran Desain Industri 790		
				B12: 1. Jumlah Penyelesaian Pencatatan Ciptaan : 10.720 2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Desain Industri 790	B12: Nota Dinas Laporan Penyelesaian Pertriwulan	
52	Ekstensifikasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Kekayaan Intelektual untuk memaksimalkan kinerja DJKI	Meningkatnya kualitas atau kuantitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang kekayaan intelektual untuk memaksimalkan kinerja DJKI	Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual (Implementasi Perjanjian Kerja sama yang masih berlaku atau pembentukan kerja sama baru) untuk memaksimalkan kinerja DJKI	B03: Pembahasan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	B03: Laporan Pembahasan	
				B06: Penyusunan rekomendasi optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual	B06: Rekomendasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual atau pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual	B09: Laporan Kegiatan Implementasi Kerja sama atau Laporan kegiatan pembentukan kerja sama baru di bidang kekayaan intelektual	
				B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama Kekayaan Intelektual	B12: Laporan Monitoring Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Implementasi Kerja sama	
53	Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan skema pencegahan	Penyelesaian sengketa KI yang berkualitas	1. Terbangunnya sistem pengaduan yang handal dengan didukung fasilitas (mediasi online)	B03: Koordinasi dengan APH dan Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan berdasarkan Peta Pelanggaran KI (Lokasi, Konten Edukasi, dan Metode Pelaksanaan Kegiatan)	B03: Laporan Koordinasi dan Rencana Kegiatan Pencegahan 2021	
				B06: Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan	B06: Laporan pencegahan pelanggaran KI	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan <i>Update</i> Peta Pelanggaran KI wilayah tahun 2021	B09: Laporan pencegahan pelanggaran KI dan Laporan Update peta pelanggaran KI	
				B12: Monitoring Evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi pencegahan pelanggaran KI tahun 2021	
			2. Terwujudnya mediator yang berkualitas	B03 : Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat untuk memperoleh pengembangan kompetensi mediasi	B03: Laporan Analisa kebutuhan	
				B06 : Pelatihan PPNS untuk pengembangan kompetensi mediasi	B06: Laporan kegiatan pelatihan	
54	Penelusuran Data Kekayaan Intelektual (PDKI) melalui web PDKI yang <i>mobile-friendly</i>	Masyarakat dapat mengakses hasil penelusuran data kekayaan intelektual melalui web PDKI yang	Masyarakat bisa mendapatkan hasil penelusuran data kekayaan intelektual yang diperoleh dengan mengakses web PDKI	B03: Hasil <i>cleansing</i> data yang diambil dari aplikasi IPROline sebelum ditampilkan di PDKI	B03: Dokumentasi Pelaksanaan <i>Cleansing</i> Data dari IPROline	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		mudah diakses melalui perangkat <i>mobile</i>		B06: Dokumen hasil Cleansing data dari aplikasi Iproline yang ditampilkan di PDKI	B06: Dokumen hasil cleansing data dari aplikasi IPROLINE yang di tampilkan di PDKI	
				B09: Dokumen UAT untuk user internal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKI	B09: Dokumen UAT untuk user internal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKI	
				B12: Dokumen UAT untuk user dari ekstrenal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKI	B12: Dokumen UAT untuk user dari ekstrenal DJKI yang menggunakan aplikasi PDKI	
55	E-Sertifikat memudahkan masyarakat mencetak sertifikat secara mandiri	Masyarakat dapat menggunakan e-sertifikat untuk mencetak sertifikat yang sudah selesai disetujui	Masyarakat dapat menggunakan e-sertifikat untuk mencetak sertifikat secara mandiri	B03: Analisa kebutuhan aplikasi e-sertifikat	B03: Laporan Analisa kebutuhan e-sertifikat	
				B06: Rancangan aplikasi e-sertifikat	B06: Laporan rancangan aplikasi e-sertifikat	
				B09: Pelaksanaan uji testing aplikasi e-sertifikat	B09: Laporan pelaksanaan uji testing aplikasi e-Sertifikat	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Sosialisasi aplikasi e-sertifikat	B12: Laporan sosialisasi aplikasi e-sertifikat	
56	Pembentukan Klinik-klinik konsultasi, analisis dan rekomendasi terkait Kekayaan Intelektual	Persiapan Terbentuknya klinik-klinik konsultasi, analisis dan rekomendasi terkait Kekayaan Intelektual	Masyarakat dapat melakukan konsultasi, memperoleh analisis dan rekomendasi terkait Kekayaan Intelektual	B03: Rapat koordinasi pembentukan klinik KI B06: Kajian pembentukan klinik KI B09: Kajian pembentukan klinik KI B12: Penentuan rekomendasi <i>pilot project</i>	B03: Laporan rapat koordinasi B06: Draft kajian pembentukan klinik KI B09: Laporan kajian pembentukan klinik KI B12: Laporan rekomendasi <i>pilot project</i>	
57	Peningkatan kapasitas SDM Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah melalui Implementasi <i>Corporate University</i>	Meningkatnya kapasitas ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah dalam memberikan pelayanan KI kepada masyarakat	1. ASN Ditjen KI di Unit Pusat memperoleh pendidikan, pelatihan dan kesempatan berkantor di WIPO	B03: Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO B06: Upaya mendorong ASN Ditjen KI memperoleh	B03: Laporan kegiatan mendorong ASN Ditjen KI memperoleh kesempatan berkantor di WIPO B06: Laporan kegiatan mendorong ASN Ditjen KI	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				kesempatan berkantor di WIPO	memperoleh kesempatan berkantor di WIPO	
			2. ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah memperoleh ToT lanjutan tentang KI tingkat lanjut	B03: Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah untuk memperoleh pendidikan pelatihan	B03: Laporan Analisa kebutuhan ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah untuk memperoleh pendidikan, pelatihan	
				B06: Peningkatan kapasitas ASN Ditjen KI di Unit Pusat dan Wilayah	B06: Laporan Workshop/Bimtek /Sosialisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA						
58	Penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM	Terlaksananya Forum Nasional Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM	Rekomendasi Nasional Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM pada tahun 2020 yang belum selesai di tingkat Wilayah dan Nasional	B03: Rekomendasi pemetaan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM tahun 2020 yang belum selesai	
				B06: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM pada Bulan Januari-Juni 2021 yang belum selesai di tingkat Wilayah dan Nasional	B06: Peta penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM Bulan Januari-Juni 2021	
				B09: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM pada Bulan Januari-September 2021 yang belum selesai di tingkat Wilayah dan Nasional	B09: Peta penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM Bulan Januari-September 2021	
				B12: Terlaksananya Forum Nasional	B12: 1. Rekomendasi pemetaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM	penanganan dugaan pelanggaran/perm asalahan HAM Bulan Juli- September 2021 yang belum selesai 2. Rekomendasi Nasional Penanganan Permasalahan HAM Tahun 2021	
59	Penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial	Terlaksananya penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Tersedianya kesepakatan dengan penerima manfaat penanganan pelanggaran HAM berat secara nonyudisial terkait kasus di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	B03: Tersedianya data kebutuhan korban dugaan pelanggaran HAM di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh B06: Terlaksananya rapat dengar pendapat dari masyarakat dalam rangka perancangan rumusan kebijakan atas penanganan dugaan pelanggaran	B03: Laporan hasil identifikasi kebutuhan korban dugaan pelanggaran HAM di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh B06: Notula rapat dengar pendapat	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				HAM masa lalu secara non yudisial di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh		
				B09: Tersedianya rumusan kebijakan atas penanganan dugaan pelanggaran HAM masa lalu secara non yudisial di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	B09: Rekomendasi rumusan kebijakan	
				B12: Terimplementasikan nya Rumusan Kebijakan atas penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	B12: Laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
60	Mendorong Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	<p>B03: Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dan daerah</p> <p>B06: Koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian Aksi Hak Asasi Manusia periode B04</p>	<p>B03: Surat Koordinasi ke Kementerian/ Lembaga/Daerah tentang pelaksanaan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian/ Lembaga</p> <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan koordinator Panitia Nasional RANHAM kepada Kementerian Koordinator dengan tembusan ke Kementerian/ Lembaga tentang capaian Aksi Hak Asasi Manusia B04 Laporan koordinator Panitia Nasional RANHAM kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan ke Kantor Wilayah tentang capaian 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					Aksi Hak Asasi Manusia B04 Pemerintah Daerah 3. Rekapitulasi capaian Aksi Hak Asasi Manusia B04 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	
				B09: Koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian Aksi HAM periode B08	B09: 1. Laporan koordinator Panitia Nasional RANHAM kepada Kementerian Koordinator dengan tembusan ke Kementerian/ Lembaga tentang capaian Aksi Hak Asasi Manusia B08 2. Laporan koordinator Panitia Nasional RANHAM kepada Pemerintah Daerah dengan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					tebusan ke Kantor Wilayah tentang capaian Aksi Hak Asasi Manusia B08 Pemerintah Daerah 3. Rekapitulasi capaian Aksi Hak Asasi Manusia B08 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	
				B12: Koordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk melaporkan capaian Aksi HAM periode B12	B12: 1. Laporan koordinator Panitia Nasional RANHAM kepada Kementerian Koordinator dengan tebusan ke Kementerian/ Lembaga tentang capaian Aksi Hak Asasi Manusia B12 2. Laporan koordinator Panitia Nasional	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					<p>RANHAM kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan ke Kantor Wilayah tentang capaian Aksi Hak Asasi Manusia B12 Pemerintah Daerah</p> <p>3. Rekapitulasi capaian Aksi Hak Asasi Manusia B12 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	
61	Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Terlaksananya penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli Hak Asasi Manusia	<p>B03: Terbitnya revisi Permenkumham Kabupaten/Kota Peduli HAM</p> <p>B06: 1. Sosialisasi Permenkumham Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Koordinasi pelaksanaan penilaian daerah</p>	<p>B03: Permenkumham Kabupaten/Kota Peduli HAM</p> <p>B06: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Surat Koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	Asasi Manusia tentang notifikasi jadwal pelaksanaan penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia ke Aplikasi pelaporan KKPHAM (http://kkpham.kemenukumham.go.id/)	
				B09: Pelaksanaan penerimaan data penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	B09: Rekapitulasi penerimaan data penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	
				B12: Pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	B12: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2020	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
62	Kerja sama HAM Internasional	Terlaksananya kerja sama luar negeri	Dokumen kerja sama luar negeri	B03: Persiapan kerja sama luar negeri	B03: Surat koordinasi kerja sama luar negeri	
				B06: Pembahasan pelaksanaan kerja sama luar negeri	B06: Laporan hasil pembahasan pelaksanaan kerja sama luar negeri	
				B09: Pelaksanaan kerja sama luar negeri	B09: Laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri	
				B12: Evaluasi kerja sama luar negeri	B12: Laporan evaluasi kerja sama luar negeri	
63	Perumusan pelaksanaan Gugus Tugas/ Kelompok Kerja Bisnis dan HAM di Indonesia	Terbentuknya Gugus Tugas/Kelompok Kerja Bisnis dan HAM di Indonesia	1 Ketetapan Pembentukan Gugus Tugas/Kelompok Kerja Bisnis dan HAM di Indonesia	B03: Rapat koordinasi dalam rangka perumusan <i>draft</i> pembentukan gugus tugas/kelompok kerja Bisnis dan HAM	B03: Laporan Rapat koordinasi perumusan draft pembentuka gugus tugas/kelompok kerja bisnis dan HAM	
				B06: Penyusunan startegi nasional Business Human Right (BHR)	B06: Draft Stranas BHR	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Finalisasi Stranas BHR	B09: Dokumen Stranas BHR	
				B12: Sosialisasi Stranas BHR	B12: Laporan rekomendasi	
64	Peningkatan kapasitas SDM Ditjen HAM di Unit Pusat dan Wilayah melalui Implementasi <i>Corporate University</i>	Meningkatnya kapasitas ASN Ditjen HAM di Unit Pusat dan Wilayah dalam bidang perlindungan HAM	ASN Ditjen HAM di Unit Pusat memperoleh pendidikan, pelatihan	B03: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis di bidang perlindungan HAM di pusat	B03: Laporan	
				B06: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis di bidang perlindungan HAM di wilayah	B06: Laporan	
				B09: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis di bidang HAM di Wilayah	B09: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
65	Pelayanan Publik Berbasis HAM di Pemerintah Daerah pada 3 (tiga) Provinsi sebagai Pilot Project 1. Jawa Barat 2. DKI Jakarta 3. Banten	Provinsi (Satker) Melaksanakan P2HAM	Terwujudnya P2HAM	B03: Terlaksananya Diseminasi P2HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah) pada 3 (tiga) Provinsi sebagai <i>Pilot Project</i>	B03: Lembar Evaluasi Peningkatan Pemahaman Peserta Diseminasi Mengenai P2HAM	
				B06: Terlaksananya Penguatan P2HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah) pada 3 (tiga) Provinsi sebagai <i>Pilot Project</i>	B06: Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Penguatan HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah)	
				B09: Monitoring Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut P2HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah)	B09: Dokumentasi Monitoring P2HAM	
				B12: Terimplementasinya Pelayanan P2HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah)	B12: Laporan Pelaksanaan Pelayanan P2HAM di UPD (Unit Pelayanan Daerah)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL						
66	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal	1. Implementasi SPIP dan meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya SPIP dan tercapainya Tingkat Maturitas SPIP Level 4 (Terkelola dan Terukur) pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM (penilaian oleh BPKP)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Unit Sekretariat Jenderal terkait dengan Tindak Lanjut <i>Quality Assurance</i> 2019 dan Tindak Lanjut hasil <i>Self-Assessment</i> 2020; Persiapan Pelaksanaan <i>Quality Assurance</i> hasil <i>Self-Assessment</i> Tahun 2020 <p>B06:</p> Penguatan pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM dan endampingan <i>Quality Assurance</i> hasil <i>self-Assessment</i> Tahun 2020	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Laporan PKS dan dokumentasi kegiatan <p>B06:</p> Surat Tugas Penguatan pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM dan Pendampingan <i>Quality Assurance</i> hasil <i>self-Assessment</i> Tahun 2020	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Pelaksanaan dan Pelaporan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP pada satuan kerja di Lingkungan Kemenkumham	B09: Laporan pelaksanaan Evaluasi SPIP berupa Penilaian Tingkat Maturitas SPIP	
				B12: Pelaporan Hasil Penguatan pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	B12: Laporan Kompilasi Hasil Penguatan pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	
		2. Implementasi Manajemen Risiko	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	B03: 1. <i>Workshop</i> Pelaksanaan Pendampingan Manajemen Risiko untuk Auditor 2. Pendampingan Manajemen Risiko pada unit eselon I	B03: 1 . Notula/ Laporan Pelaksanaan <i>Workshop</i> MR 2 . Laporan Pendampingan	
				B06: 1. Persiapan Pendampingan Manajemen	B06: 1. Laporan Pelaksanaan Bimtek MR	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Risiko berupa Bimtek Penerapan MR</p> <p>2. Pelaksanaan pendampingan Penerapan MR pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2. Laporan pendampingan Penerapan MR</p>	
				<p>B09: Pelaksanaan Pendampingan Penerapan MR pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B09: Laporan Pendampingan Penerapan MR</p>	
				<p>B12: Evaluasi Penerapan MR di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B12: Laporan Evaluasi Penerapan MR</p>	
		<p>3. Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018</p>	<p>Tersusunnya Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018</p>	<p>B03: Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018</p>	<p>B03: Notula dan dokumentasi penyusunan revisi Permenkumham no.5 Th 2018</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: Penetapan Revisi Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018	B06: Permenkumham revisi	
67	Penguatan Satuan Kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBM	Penetapan jumlah satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM	B03: 1. Surat keputusan perihal Tim Penilai Internal (TPI) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM 2. Penguatan Tim Penilai Internal (TPI)	B03: 1. SK Menteri tentang Tim Penilai Internal 2. SK Irjen tentang Tindak lanjut Tim Penilai Internal 3. Laporan penguatan TPI (termasuk pendampingan)	
				B06: 1. PKS Persiapan penilaian mandiri (<i>Self Assessment</i>) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM dengan narasumber dari Kemenpan RB 2. Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di	B06: 1. Laporan PKS Persiapan Penilaian Mandiri 2. Surat Tugas Penilaian Mandiri	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				lingkungan Kemenkumham		
				B09: Laporan Hasil Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham dan usulan satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM kepada Menteri Hukum dan HAM RI	B09: Laporan Hasil Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>)	
				B12: Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM	B12: Laporan Hasil Evaluasi	
		2. Terimplementasinya Peran Tunas Integritas	Terlaksananya program Tunas Integritas Pada Satuan Kerja	B03: 1. Reviu Pedoman Tunas Integritas 2. Workshop Review Pelaksanaan Tunas Integritas	B03: 1. Laporan Hasil Reviu Pedoman Tunas Integritas 2. Laporan Pelaksanaan Workshop	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>B06: Pelaksanaan reviu Tunas Integritas Tingkat Pusat</p> <p>B09: Pelaksanaan reviu Tunas Integritas Tingkat Wilayah dan UPT</p> <p>B12: Evaluasi hasil reviu dan pelaksanaan Tunas Integritas Kumham</p>	<p>B06: 1. Surat tugas 2. Laporan pelaksanaan reviu Tunas Integritas</p> <p>B09: 1. Surat tugas 2. Laporan pelaksanaan reviu Tunas Integritas</p> <p>B12: Kompilasi laporan reviu dan pelaksanaan Tunas Integritas</p>	
68	Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP melalui audit, pendampingan, reviu dan pemantauan	Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM memenuhi WTP	<p>B03: 1. Memetakan temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan 2. Persiapan, rapat koordinasi pelaksanaan reviu LK Tahun 2020 3. Laporan Hasil Reviu LK Kemenkumham Tahun 2020</p>	<p>B03: 1. Pemetaan Temuan 2. Notula dan dokumentasi rapat 3. Laporan Hasil Reviu</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: Pelaksanaan pengawasan melalui pendampingan dan audit	B06: Laporan Pelaksanaan	
				B09: Pelaksanaan pengawasan melalui audit Pelaksanaan Reviu LK Semester 1 Tahun 2021	B09: Laporan Pelaksanaan Hasil Audit dan Reviu	
				B12: Laporan hasil pendampingan dan laporan hasil audit Tahun 2021	B12: Laporan Hasil Pendampingan	
69	Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Kemenkumham	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kemenkumham dengan nilai SAKIP minimal A	Laporan Kinerja dan SAKIP Kemenkumham akuntabel dan berorientasi hasil	B03: 1. Rapat persiapan dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 2. Reviu laporan Kinerja Kemenkumham	B03: Notulen rapat dan PKS, Laporan Hasil Reviu atas laporan Kinerja Kemenkumham	
				B06: Pelaksanaan evaluasi SAKIP dan forum panel	B06: Laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP Unit/Satker	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Kompilasi laporan hasil evaluasi B12: 1. Daring <i>Workshop</i> SAKIP dengan Kantor Wilayah 2. Monitoring Pelaksanaan Reviu Laporan kinerja dan Evaluasi SAKIP	B09: Ikhtisar hasil evaluasi (laporan kompilasi) B12: 1 . Notula dan dokumentasi workshop 2 . Laporan Monitoring dan Evaluasi	
70	Terlaksananya Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Terselesaikannya pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	B03: 1. Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (pengadaan Tahun 2020) 2. Pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berjalan (tahun 2021)	B03: 1. Surat Tugas Laporan Hasil Audit Barjas (pengadaan Tahun 2020) 2. Surat Tugas dan Laporan Pendampingan Barjas (pengadaan Tahun 2021)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: 1 . Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (pengadaan Tahun 2020) 2 . Pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berjalan (tahun 2021)	B06: 1. Surat Tugas Laporan Hasil Audit Barjas (pengadaan Tahun 2020) 2. Surat Tugas dan Laporan Pendampingan Barjas (pengadaan Tahun 2021)	
				B09: Pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berjalan (tahun 2021)	B09: Surat Tugas dan Laporan Pendampingan Barjas (pengadaan Tahun 2021)	
				B12: Pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berjalan (tahun 2021)	B12: Surat Tugas dan Laporan Pendampingan Barjas (pengadaan Tahun 2021)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
71	Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya PMPRB di lingkungan Kemenkumham	Hasil PMPRB Kemenkumham minimal 90	B03: 1. Penyusunan Tim PMPRB 2. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) PMPRB	B03: 1. Notulen rapat dan PKS 2. Laporan Hasil Reviu atas laporan kinerja Kemenkumham	
				B06: Pelaksanaan Pendampingan PMPRB	B06: surat tugas pendampingan PMPRB	
				B09: Kompilasi laporan hasil PMPRB	B09: Laporan Kompilasi hasil PMPRB	
				B12: Monitoring dan Evaluasi hasil PMPRB	B12: Laporan monitoring dan evaluasi hasil PMPRB	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL						
72	Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah, Progsun PP dan Perpres dengan menggunakan Teknologi Informasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah, Progsun PP dan Perpres memanfaatkan aplikasi khusus	Termanfaatkannya aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres untuk memantau perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah	B03: 1. Rancangan proses bisnis sistem aplikasi dan Prototype system 2. <i>User Acceptance Test</i> aplikasi dan <i>Deployment</i> 3. Uji coba Pemanfaatan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	B03: 1. Dokumen data <i>flow diagram</i> sistem 2. <i>Screenshot</i> Sistem Informasi 3. Hasil UAT Test dan Laporan Deployment 4. Data uji coba Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	
				B06: Pemanfaatan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	B06: Data Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	
				B09: Pemanfaatan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional,	B09: Data Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Progsun PP dan Perpres	Progsun PP dan Perpres	
				B12: Pemanfaatan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	B12: Data Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Nasional, Progsun PP dan Perpres	
73	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja	Tersusunnya rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja baik perubahan, penggantian, pencabutan dan/atau pengintegrasian/simplifikasi berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya laporan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 80 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	B03: 1. Tersusunnya inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai objek analisis dan evaluasi hukum 2. Tersusunnya bahan dan data awal permasalahan objek analisis dan evaluasi hukum dengan Undang-Undang Cipta Kerja	B03: 1. SK pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 2. Daftar peraturan perundang-undangan hasil inventarisasi 3. Dokumen bahan dan data awal permasalahan objek analisis dan evaluasi hukum dengan Undang-Undang Cipta Kerja 4. Laporan perkembangan kegiatan analisis dan evaluasi hukum	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				3. Terlaksananya kegiatan analisis dan evaluasi hukum menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan		
				B06: 1. Perumusan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 80 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2. Tersusunnya laporan akhir hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 80 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan	B06: Dokumen Laporan Akhir hasil analisis dan evaluasi hukum	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Undang-Undang Cipta Kerja		
74	Pembentukan <i>Database</i> hukum Nasional melalui pengintegrasian anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012	Terintegrasinya 75 % anggota JDIH di tahun 2021	Meningkatnya jumlah anggota JDIHN yang terintegrasi Keterangan: Jumlah Anggota JDIHN = 1.212 anggota Anggota JDIHN yang sudah terintegrasi sampai tahun 2020= 581 anggota	B06: Terintegrasinya 50% anggota JDIHN B12: Terintegrasinya 75% anggota JDIHN	B06: Daftar anggota JDIHN yang terintegrasi B12: Daftar anggota JDIHN yang terintegrasi	
75	Pemamfaatan aplikasi e-Dupak Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Meningkatnya pemahaman Penyuluh Hukum dalam pemanfaatan E-Dupak Penyuluh Hukum di lingkungan 5 Kanwil Kemenkumham (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara), 8 Unit Utama Kemenkumham, Lembaga Negara yang memiliki Penyuluh Hukum serta Pemerintah Daerah (Jawa Tengah, Jawa	Termanfaatkannya aplikasi E-Dupak dalam penilaian angka kredit Penyuluh Hukum	B03: 1. Menyusun SK Tim 2. Menyusun SOP Penggunaan Aplikasi 3. Melakukan pelatihan dan uji coba internal 4. Membuat surat Pengumuman penilaian angka kredit B06: 1. Melakukan Sosialisasi penilaian angka kredit kepada Unit	B03: 1. SK Tim 2. Dokumen SOP 3. Jadwal kegiatan B06: 1. Surat Permohonan Fasilitasi 2. Undangan Peserta	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		barat, DKI Jakarta dan Banten)		<p>Eselon I Kemenkumham, Lembaga Negara, kantor Wilayah Kemenkumham dan pemerintah Daerah</p> <p>2. Melakukan uji coba eksternal</p>	<p>3. Notulensi Dokumentasi kegiatan</p>	
				<p>B09: Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Melalui E- Dupak</p>	<p>B09: 1. SK Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Pusat (Unit Pusat dan Unit Kerja) dan/atau Kantor Wilayah dan/atau Pemda; 2. Formulir administrasi Penilaian Angka Kredit penyuluh Hukum; 3. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK); 4. Penetapan Angka Kredit (PAK); 5. Notulensi; 6. Dokumentasi kegiatan.</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Monitoring, evaluasi dan Laporan Kegiatan	B12: Laporan Akhir	
76	Peningkatan kapasitas SDM BPHN melalui implementasi <i>Corporate University</i>	Meningkatnya kapasitas SDM BPHN di pusat dan wilayah	Terlaksanya peningkatan kapasitas SDM BPHN di pusat dan wilayah	B03: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di pusat	B03: Laporan	
				B06: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di wilayah	B06: Laporan	
				B09: Pelaksanaan workshop/sosialisasi /bimbingan teknis Penyuluh Hukum di Wilayah	B09: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
77	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	Terpenuhinya Pemberi Bantuan Hukum yang Berkualitas	Meningkatnya jumlah calon Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi	B03: Penunjukan Panitia dan Pokja, serta pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.	B03: 1. SK Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi 2. SK Tim Pokja Pusat Verifikasi dan Akreditasi 3. Pengumuman Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi	
				B06: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru).	B06: Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
				B09: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Lama)	B09: Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM						
78	Rekomendasi Hasil Penelitian/analisis kebijakan dan Modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas	Rekomendasi Hasil Penelitian/analisis kebijakan dan Modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang dimanfaatkan sebagai bahan pelatihan sensitivitas disabilitas bagi pemberi bantuan hukum	1. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Penelitian/analisis kebijakan 2. Tersusunnya Modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya SK Tim 2. Tersusunnya Proposal Penelitian/Analisis Kebijakan 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Lapangan <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan dan Analisis Data Lapangan 2. Tersusunnya Laporan Akhir Penelitian/Analisis Kebijakan 3. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan 4. Tersampainya Rekomendasi Kebijakan <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Tindak lanjut 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim 2. Proposal Penelitian/ Analisis Kebijakan 3. Laporan Data lapangan <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengolahan dan Analisis Data (Laporan Antara) 2. Laporan Akhir Penelitian/ Analisis Kebijakan 3. Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Brief</i> dan <i>Policy Paper</i>) 4. Bukti Penyampaian Rekomendasi Kebijakan <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi/Rencana 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan 2. Pembahasan penyusunan modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas	Tindaklanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan 2. Laporan FGD penyusunan modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas	
				B12: 1. Tersusunnya modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas 2. Pengukuran pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	B12: 1. Modul layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas 2. Laporan Capaian Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	
79	Pengembangan Survei Digital	1. <i>Update</i> aplikasi survei digital 2. Implementasi survei digital	1. Tersedianya aplikasi survei digital 2. Hasil survei yang dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik	B03: 1. Tersusunnya Tim Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	B03: 1. SK Tim 2. Proposal Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>2. Tersusunnya Proposal Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>3. Sosialisasi indikator Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi sesuai panduan survei secara <i>daring</i> pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks</p>	<p>3. Laporan Sosialisasi indikator Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi sesuai panduan survei secara <i>daring</i> pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Rekapitulasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan I</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan I		
				B06: 1. Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan I 2. Pelaksanaan verifikasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi 3. Pengolahan data hasil verifikasi survei online	B06: 1. Laporan Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan I 2. Laporan data lapangan hasil verifikasi survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPK-IKM) dan Indek Integritas organisasi</p> <p>4. Tersusunnya Rekomendasi hasil verifikasi survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>5. Tersampainya Rekomendasi hasil verifikasi survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>6. Monitoring dan Evaluasi Data hasil survei online</p>	<p>3. Laporan pengolahan data hasil verifikasi survei online Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPK-IKM) dan Indek Integritas organisasi</p> <p>4. Rekomendasi Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>5. Bukti Penyampaian Rekomendasi Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>6. Rekapitulasi Data hasil survei online</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan II	Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan II	
				<p>B09:</p> <p>1. Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan II</p> <p>2. Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi hasil Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta</p>	<p>B09:</p> <p>1. Laporan Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan II</p> <p>2. Rencana Aksi/Rencana Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi hasil Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Indeks Integritas Organisasi</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan III</p>	<p>IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi</p> <p>3. Rekapitulasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan III</p>	
				<p>B12:</p> <p>1. Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan III</p> <p>2. Pengukuran pemanfaatan rekomendasi hasil Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks</p>	<p>B12:</p> <p>1. Laporan Analisis Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan III</p> <p>2. Laporan Capaian Pemanfaatan hasil Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi 3. Monitoring dan Evaluasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan IV	Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi 3. Rekapitulasi Data hasil survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi Triwulan IV	
		3. Pemetaan/survei atas: a. Layanan Internal Dukungan Manajemen b. Layanan Kualitas Bantuan Hukum c. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tersusunnya analisis data hasil survei yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan atas: a. Layanan Internal Dukungan Manajemen b. Layanan kualitas Bantuan Hukum, c. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	B03: 1. Tersusunnya SK Tim 2. Tersusunnya indikator Layanan Internal Dukungan Manajemen B06: 1. Tersusunnya indikator Layanan kualitas Bantuan Hukum 2. Tersusunnya indikator Layanan	B03: 1. SK Tim 2. Indikator Layanan Internal Dukungan Manajemen B06: 1. Indikator Layanan kualitas Bantuan Hukum 2. Indikator Layanan Jaringan Dokumentasi dan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 3. Pengembangan modul aplikasi survei indikator Layanan Internal Dukungan Manajemen	Informasi Hukum (JDIH) 3. Laporan pengembangan modul aplikasi survei Layanan Internal Dukungan Manajemen	
				B09: 1. Pengembangan modul aplikasi survei indikator Layanan kualitas Bantuan Hukum 2. Pengembangan modul aplikasi survei indikator Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 3. Sosialisasi aplikasi survei Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan	1. B09: 2. Laporan pengembangan modul aplikasi survei Layanan kualitas Bantuan Hukum 3. Laporan pengembangan modul aplikasi survei Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 4. Laporan Sosialisasi aplikasi survei Layanan Internal Dukungan Manajemen,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara daring</p> <p>4. Pelaksanaan Survei Layanan Internal Dukungan Manajemen</p> <p>5. Analisis data hasil survei Layanan Internal Dukungan Manajemen</p>	<p>Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara daring</p> <p>5. Data hasil survei Layanan Internal Dukungan Manajemen</p> <p>6. Laporan analisis data survei Layanan Internal Dukungan Manajemen.</p>	
				<p>B12:</p> <p>1. Pelaksanaan Survei Layanan kualitas Bantuan Hukum</p> <p>2. Analisis data hasil survei Layanan kualitas Bantuan Hukum</p> <p>3. Pelaksanaan Survei Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p>	<p>B12:</p> <p>1. Data hasil survei Layanan kualitas Bantuan Hukum</p> <p>2. Laporan analisis data survei Layanan kualitas Bantuan Hukum</p> <p>3. Data hasil survei Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>4. Analisis data hasil survei Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p> <p>5. Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi hasil survei Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p> <p>6. Pengukuran pemanfaatan rekomendasi hasil Survei Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan</p>	<p>4. Laporan analisis data survei Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p> <p>5. Rencana Aksi/ Rencana Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi hasil Survei Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</p> <p>6. Laporan Capaian Pemanfaatan hasil Survei Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 7. Evaluasi pelaksanaan survei online Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). 7. Laporan evaluasi pelaksanaan survei online Layanan Internal Dukungan Manajemen, Layanan kualitas Bantuan Hukum, dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	
80	Membangun Balitbangkumham go internasional	1. Publikasi Karya Tulis Ilmiah terindeks global 2021-2024 dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i> 2. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah internasional	1. <i>Terpublikasikannya</i> Karya Tulis Ilmiah di jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global 2021-2024 dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i> 2. <i>Terselenggaranya</i> pertemuan ilmiah internasional	B03: 1. Pembentukan Tim <i>Grand Desain</i> Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM terindeks global 2021-2024 2. Tersusunnya <i>Grand Desain</i> Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM	B03: 1. SK Tim <i>Grand Desain</i> Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM terindeks global 2021-2024 2. <i>Grand Desain</i> Publikasi Karya Tulis Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM terindeks global 2021-2024	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				terindeks global 2021-2024		
				B06: 1. Pemetaan publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global 2. Pembahasan pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional 3. Pengembangan media publikasi Balitbang Hukum dan HAM yang terindeks global	B06: 1. Laporan pemetaan publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global 2. Notula rapat, undangan dan dokumentasi pembahasan pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional 3. Laporan Pengembangan media publikasi Balitbang Hukum dan HAM yang terindeks global	
				B09: 1. Terpublikasikannya karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global	B09: 1. Laporan publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>2. Progres pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional</p> <p>3. Pengembangan media publikasi Balitbang Hukum dan HAM yang terindeks global</p>	<p>2. Laporan pemantapan persiapan pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional</p> <p>3. Laporan Pengembangan media publikasi Balitbang Hukum dan HAM yang terindeks global</p>	
				<p>B12:</p> <p>1. Terpublikasikannya karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global</p> <p>2. Pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional</p> <p>3. Pengembangan media publikasi dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i> 2021-</p>	<p>B12:</p> <p>1. Laporan publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal/ prosiding/ buku/ pertemuan Ilmiah terindeks global</p> <p>2. Laporan pelaksanaan pertemuan ilmiah internasional</p> <p>3. Laporan Pengembangan media publikasi dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go</i></p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				2024 yang terindeks global	<i>International</i> 2021-2024 yang terindeks global	
81	Meningkatkan kapasitas ASN menuju Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> melalui implementasi <i>Corporate University</i>	Peningkatan kapasitas ASN Balitbang Hukum dan HAM yang dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i>	Meningkatnya kapasitas ASN Balitbangkumham dalam rangka mewujudkan Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya data kompetensi dasar dan teknis Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 2. Tersusunnya pemetaan pengembangan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 3. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 2021-2024 <p>B06: Implementasi pengembangan pegawai di pusat dan</p>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pemetaan data kompetensi dasar dan teknis Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 1. Dokumen pemetaan pengembangan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 2. pegawai Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 3. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai Balitbang Hukum dan HAM <i>Go Internasional</i> 2021-2024 <p>B06: Laporan Implementasi pengembangan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i>	pegawai di pusat dan wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i>	
				B09: Implementasi pengembangan pegawai di pusat dan wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i>	B09: Laporan Implementasi pengembangan pegawai di pusat dan wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i>	
				B12: 1. Implementasi pengembangan pegawai di pusat dan wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum dan HAM <i>Go International</i>	B12: 1. Laporan Implementasi pengembangan pegawai di pusat dan wilayah melalui <i>Coaching and Mentoring/Diklat/workshop</i> Balitbang Hukum	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				2. Evaluasi data hasil analisis peningkatan dan kesenjangan kompetensi pegawai 3. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Balitbang Hukum dan HAM	dan HAM <i>Go International</i> 2. Laporan evaluasi data hasil analisis peningkatan dan kesenjangan kompetensi pegawai 3. Dokumen Indeks Profesionalitas ASN Balitbang Hukum dan HAM	
82	Rekomendasi Hasil Penelitian/Analisis Kebijakan Evaluasi Peran Agen Perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Rekomendasi Hasil Penelitian/Analisis Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan pedoman peran Agen Perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Penelitian/Analisis Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan pedoman peran Agen Perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan	B03: 1. Tersusunnya SK Tim 2. Tersusunnya Proposal Penelitian/Analisis Kebijakan 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Lapangan B06: 1. Pengolahan dan Analisis Data Lapangan 2. Tersusunnya Laporan Akhir Penelitian/	B03: 1. SK Tim 2. Proposal Penelitian/ Analisis Kebijakan 3. Laporan Data lapangan B06: 1. Laporan Pengolahan dan Analisis Data (Laporan Antara) 2. Laporan Akhir Penelitian/	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>Analisis Kebijakan</p> <p>3. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan</p> <p>4. Tersampainya Rekomendasi Kebijakan</p>	<p>Analisis Kebijakan</p> <p>3. Rekomendasi Kebijakan (<i>Policy Brief</i> dan <i>Policy Paper</i>)</p> <p>4. Bukti Penyampaian Rekomendasi Kebijakan</p>	
				B09: Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	B09: Rencana Aksi/Rencana Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	
				B12: Pengukuran pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	B12: Laporan Capaian Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						
83	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh Peserta Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Lulus sesuai standar penilaian; Alumni Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat/melaksanakan tugas menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Pertama 	85% Alumni Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diangkat/ menjadi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Kompetensi Bidang tugasnya	<p>B03: Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I</p> <p>B06: Penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan II s.d III</p> <p>B09: penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV s.d VI</p> <p>B12: penyelenggaraan Pelatihan Pembimbing</p>	<p>B03: Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I</p> <p>B06: Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan II s.d III</p> <p>B09: Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV s.d VI</p> <p>B12: 1. Laporan Kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Kemasyarakatan Angkatan V s.d VIII	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V s.d VIII 2. Surat Keterangan Pengangkatan JFT PK	
84	Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Terselenggaranya Diklat SPPA untuk 270 Orang/9 Angkatan	1. 80 % alumni peserta Diklat SPPA yang telah meningkat kompetensinya 2. 80% alumni peserta telah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	B03: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan I B06: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan II s/d III B09: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan IV s/d VII	B03: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan I beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat B06: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan II s/d III beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					Diklat SPPA Angkatan IV s/d VII beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat	
				B12: Pelaksanaan Diklat SPPA Angkatan VIII s/d IX	B12: Laporan dan Evaluasi kegiatan seta dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat SPPA Angkatan VIII s/d IX beserta SK Pengajar dan SK Peserta Diklat Surat Keterangan Penempatan Peserta Diklat SPPA AKT I s/d IX	
85	Menyelenggarakan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i> di lingkungan Kemenkumham	Terselenggaranya Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i> di lingkungan Kemenkumham	Tersedianya Profil Preferensi Kompetensi di lingkungan Kemenkumham	B03: 3.300 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i>	B03: 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i>	B06: 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	
				B09: 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i>	B09: 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	
				B12: 3.000 pegawai Kemenkumham telah dilakukan Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i>	B12: 1. SK Kegiatan Preferensi kompetensi 2. Laporan Hasil	
86	Implementasi proyek perubahan di Kementerian Hukum dan HAM	Terpetakannya proyek perubahan Kementerian Hukum dan HAM	Terimplimentasikan-nya proyek perubahan Lemhanas, PKN1, PKN2, PKA, PKP	B03 : Inventarisasi pegawai yang telah mengikuti DiklatPIM dan daftar proyek perubahannya dari Tahun 2019 – 2020	B03: Data dan Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B06: Pemetaan proyek perubahan yang telah terimplementasi	B06: Data dan Laporan	
				B09: Progress pelaksanaan proyek perubahan yang telah terimplementasi (50-100 %)	B09: Data dan Laporan	
87	Akreditasi pada Politeknik	1. Terakritisinya Seluruh Program Studi dan kelembagaan POLTEKIP	1. Seluruh Program Studi pada POLTEKIP mendapatkan akreditasi dengan kriteria baik 2. Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP mendapatkan akreditasi dengan kriteria baik	B03: 1. Persiapan Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Persiapan Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	B03: 1. SK Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. SK Tim Penyusun Borang Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP 3. Notulensi Rapat Persiapan 4. Dokumentasi	
				B06: Penyusunan <i>Draft</i> Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP	B06: 1. <i>Draft</i> Borang Pengajuan Akreditasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Penyusunan <i>Draft</i> Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	Program Studi pada POLTEKIP 2. <i>Draft</i> Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	
				B09: 1. Finalisasi Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Finalisasi Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	B09: 1. Dokumen Borang Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Dokumen Borang Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	
				B12: 1. Pengajuan Akreditasi Program Studi pada POLTEKIP 2. Pengajuan Akreditasi Kelembagaan Perguruan Tinggi POLTEKIP	B12 : 1. Dokumentasi pada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi <i>Online</i> (SAPTO) 2. Dokumen Penilaian Angka Kecukupan Assesor BAN PT	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				3. Penilaian/Evaluasi Akreditasi Program Studi dan Kelembagaan POLTEKIP oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)	3. Berita Acara <i>Assessment</i> Lapangan Assesor BAN PT	
		2. Tersusunnya Instrumen /borang Akreditasi BAN PT pada POLTEKIM	Terlaksananya Instrumen /borang Akreditasi BAN PT	B03: Penyelenggaraan Tim Instrumen /borang Akreditasi BAN PT	B03: 1.SK Tim penyusunan Instrumen /borang Akreditasi BAN PT Prodi Hukum Keimigrasian dan Prodi Administrasi Keimigrasian 2.Laporan dan dokumentasi Rapat penyusunan proses penyusunan Instrumen /borang Akreditasi BAN PT Prodi Hukum Keimigrasian dan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					Prodi Aministrasi Keimigrasian	
				B06 : Penyusunan Instrumen /borang Akreditasi BAN PT	B06: Laporan dan dokumentasi proses penyusunan Instrumen /borang Akreditasi BAN PT Prodi Hukum Keimigrasian dan Prodi Aministrasi Keimigrasian	
				B09: Luaran dan Capaian Tridharma	B09: Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan keluaran produk penelitian. Laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan penyelenggaraan meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), Peserta didik, kurikulum, sarana prasarana,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					keuangan (pembiayaan dan pendanaan), dan kerjasama.	
				B12: Laporan Evaluasi	B12: Laporan visitasi Akreditasi BAN PT atas instrumen / borang Prodi Hukum Keimigrasian Prodi Aministrasi Keimigrasian	